

UPETI DIRGANTARA BUAT TENTARA

Menteri Pertahanan Purnomo Yusrigantoro (ketiga dari kanan) bersama Gubernur Kalimantan Timur Awang Farook Ishak (kedua dari kanan) menyaksikan pemberian serah-terima pemberian helikopter Bell-412EP dari Provinsi Kalimantan Timur di PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Juli 2013.

PT Dirgantara Indonesia diduga mengalirkan fulus senilai Rp 178,98 miliar kepada puluhan jenderal dan perwira menengah di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta pejabat kementerian lain. Upeti disisihkan dari proyek pengadaan pesawat dan helikopter hingga pemeliharaannya yang digarap perusahaan penerbangan negara itu selama 2008-2016. Menggunakan rekanan fiktif, PT Dirgantara membungkus dana khusus itu sebagai “biaya pemasaran”.

CATATAN itu menghimpun nama-nama jenderal hingga perwira menengah di Kementerian Pertahanan dan tiga matra Tentara Nasional Indonesia serta pejabat di lembaga lain. Berformat tak seragam, kolom-kolom dalam dokumen tersebut umumnya mencantumkan jabatan, nama pejabat, dan nominal duit.

Dalam salah satu berkas yang berjudul “Proyek helikopter Bell 412EP Kemenhan-TNI AD APBNP 2011” tertulis nama Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan saat itu, Marsekal Madya Eris Herryanto. Di kolom uang tercatat Rp 250 juta. Di bawah Eris, berderet nama pejabat lain di Kementerian Pertahanan dan pejabat di TNI Angkatan Darat. Misalnya di sebe-

DOK.TEMPO/ADITYA HERLAMBAH

LAPORAN UTAMA

lah nama Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat saat itu, Letnan Jenderal Budiman, tertulis US\$ 100 ribu.

Nama Eris muncul dalam dokumen lain untuk pengadaan yang lain lengkap dengan jumlah uang di sebelah namanya. Dalam dokumen berbeda, ada juga nama Jenderal Moeldoko, yang menjabat KSAD selama tiga bulan pada 2013—kini Kepala Staf Kepresidenan. Pada kolom uang, tertera angka Rp 1 miliar. Di bawah Moeldoko, berderet nama perwira lain beserta jumlah duit, dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Angka total untuk “Markas Besar Angkatan Darat” Rp 2,35 miliar.

Terentang dari 2008 hingga 2016, dokumen-dokumen itu mencatat puluhan jenderal hingga letnan kolonel—satu nama bisa muncul lebih dari satu kali—yang diduga mendapatkan upeti dari PT Dirgantara Indonesia melalui perusahaan mitranya selama periode tersebut. Ada juga nama pejabat dari lembaga lain, seperti Sekretariat Negara. Total pembelian mencapai Rp 178,98 miliar.

Pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri, mengatakan lembaran berkas tersebut sudah dikantongi lembaganya. KPK mendapatkannya dari perusahaan rekanan PT Dirgantara ketika mengusut korupsi di perusahaan pelat merah bidang penerbangan ini. “Uang dari PT DI yang dikeluarkan untuk mitra dan digunakan lagi un-



1. Pesawat CN-235 untuk TNI Angkatan Laut diserahkan kepada Kementerian Pertahanan oleh PT Dirgantara Indonesia di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Oktober 2013.

2. Perakitan helikopter Bell 412EP pesanan TNI Angkatan Darat di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Juli 2013.

PT. BUMILOKA TEGAR PERKASA
ENGINEERING GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIER
Komplek Kebayoran Centre Blok A. No. 10
Jl. Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
Phone : (021) 7245149 (Hunting) Fax. (021) 7245121
E-mail : bumiloka@cbn.net.id

KWITANSI
No. 007/BTP-FP/III/2014

Sudah terima dari : **PT. DIRGANTARA INDONESIA**
Jl. PAJAJARAN NO. 154. BANDUNG

Banyaknya uang : **SATU JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU DELAPAN RATUS DUA PULUH US DOLLAR**

Untuk Pembayaran : **Pelunasan atas Imbalan Mitra Penjualan atas kontrak 6 (enam) unit Bell-412 EP kepada TNI AD - Kementerian Pertahanan RI sebesar USD 30.324.000,- sesuai Surat Perjanjian Kemitraan No.35/AI0000/B1/02/2010 tanggal 16 Februari 2010.**

Jakarta, 20 Maret 2014

PT. BUMILOKA TEGAR PERKASA
ENGINEERING
Nahang Hamdani Basnawi
Director

Jumlah Rp. USD 1,667,820.00

PERHATIAN !!!
Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan dan pembayaran dengan cek / giro dianggap sah setelah cair.

PT. ANGKASA MITRA KAR
WISMA BENIH LT. VII, JL. JEND. SUDIRMAN
JAKARTA, 10210 INDONESIA
TEL : (62-21) 570 0337, 910 8163, 574 2043
FAX : (62-21) 570 4418, 573 4922

PT. DIRGANTARA INDONESIA
Jl. PAJAJARAN NO. 154. BANDUNG

Sudah terima dari : **PT. DIRGANTARA INDONESIA**

Banyaknya uang : **DELAPAN MILIAR TUJUH RATUS SEM DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH E**

Untuk Pembayaran : **Imbalan Mitra Penjualan atas ko Bell-412EP TNI AL sebesar Rp. 25.296.920.61 Perjanjian Kemitraan No.02/AI0000/B1/12**

Jumlah Rp. 8.795.549.886,97

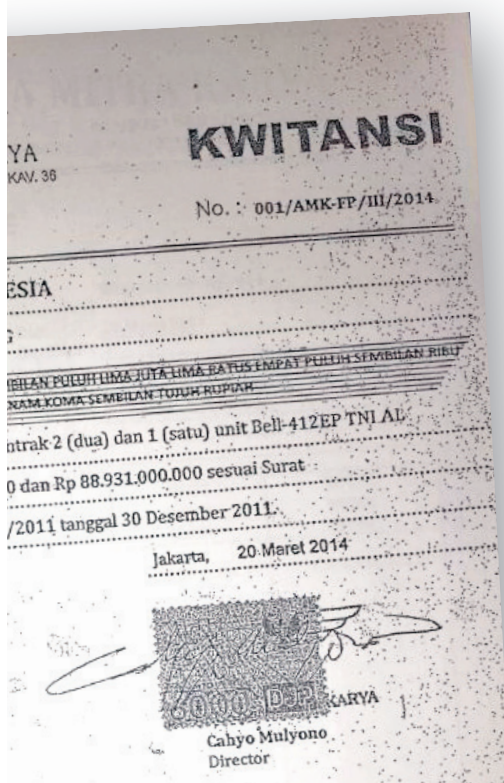
PERHATIAN !!!
Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan dan pembayaran dengan cek / giro dianggap sah setelah cair.

2



TEMPO/PRIMA MULIA (CN 235), TEMPO/PRIMA MULIA (BELL 412 EP)

3, 4. Kuitansi yang diduga sebagai bukti penyerahan uang komisi.



ISTIMEWA (KUITANSI)

tuk berbagai kebutuhan tersebut akan ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik,” kata Ali pada Selasa, 13 Oktober lalu.

Ali enggan menyebutkan nama-nama penerima aliran dana tersebut. Menurut dia, penyidik masih berfokus merampungkan pengusutan korupsi pengadaan pesawat dan helikopter oleh PT Dirgantara. Sudah ada enam tersangka yang dijeprat dengan kerugian negara mencapai Rp 202,19 miliar dan US\$ 8,6 juta, atau totalnya mencapai Rp 303 miliar.

Selama delapan tahun, sebagian besar duit yang menjadi kerugian negara itu ditebarkan kepada sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan, perwira TNI, petinggi lembaga lain, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Rp 178,98 miliar diduga menjadi upeti untuk mereka, sisanya dinikmati para pejabat PT Dirgantara Indonesia dan perusahaan rekanan. “Untuk siapa-siapanya, nanti akan dibuka di persidangan oleh penuntut umum,” ujar Ali.

Eris Herryanto membantah menerima duit sebagaimana tertulis dalam catatan. “Jangan memancing saya mengomentari berita yang saya sendiri tidak akui. Sekjen

bukan pejabat yang menentukan, kenapa harus terima uang? Lebih baik ke Kemhan saja untuk dapat data akurat,” katanya. Budiman juga mengatakan tidak pernah menerima setoran dari PT Dirgantara ataupun rekanannya. “Tidak pernah sama sekali karena memang kami tidak mau,” ujar Budiman, yang belakangan menjadi KSAD sebelum digantikan Moeldoko.

Sanggahan juga disampaikan Moeldoko. “Saya jadi KSAD hanya tiga bulan, tidak sempat mengurus pengadaan,” ucapnya, “dan pastinya saya juga sudah tidak ingat.”



TOKO dua lantai di Blok A/10 Kebayoran Centre, Jakarta Selatan, itu terpantau sepi pada Kamis, 22 Oktober lalu. Tak ada plang nama perusahaan terpacak di bagian depannya. Masuk ke lobi seluas 2 x 3 meter, seorang pria yang mengaku bernama Bahari terduduk di sana. Ia mengatakan bangunan itu kantor PT Bumiloka Tegar Perkasa dan PT Anugerah Mitra Karya sekaligus. Pemiliknya Didi Laksamana. “Pak Didi tidak di kantor,” kata Bahari, yang menjaga kantor tersebut.

Kedua perusahaan itu adalah dua dari enam perusahaan yang menjadi “mitra pemasaran” PT Dirgantara Indonesia. Empat perusahaan lain adalah PT Penta Mitra Abadi, PT Niaga Putra Bangsa, PT Abadi Sentosa Perkasa, dan PT Selaras Bangun Usaha. Perusahaan yang disebut terakhir bergabung sebagai “mitra” pada 2012. Adapun lima lainnya disiapkan Didi sejak awal 2008.

Tempo menelusuri direksi dan pemegang saham perusahaan-perusahaan ini. Mereka di antaranya ibu rumah tangga dan mahasiswi. Salah seorang Direktur PT Penta Mitra Abadi, Monica Anastasia, adalah pedagang pakaian dan makanan di lapak *online*. Saat dihubungi, Monica, yang pernah diperiksa KPK sebagai saksi untuk Direktur Utama PT Dirgantara 2007-2017, Budi Santoso, menolak menjawab pertanyaan. “Salah sambung,” ujarnya.

Ali Fikri, juru bicara KPK, mengatakan keenam “mitra” tersebut digandeng oleh PT Dirgantara untuk melancarkan bisnis perusahaan. Ide penggunaan mitra penjualan ini muncul pada 2007 saat direksi PT Dirgantara merasa perlu mengalo-

LAPORAN UTAMA

kasikan dana khusus, yang disebut “*cash back*”, untuk disetorkan kepada pemilik anggaran agar perusahaan penerbangan ini terus mendapatkan proyek pembelian pesawat ataupun jasa pemeliharaan.

Budi Santoso menyetujui gagasan tersebut dan meminta dana khusus itu sebagai “*cost structure*” dengan sandi anggaran “81A Biaya Keagenan” sebesar 1-9 persen dari nilai proyek. Budi juga meminta pembayarannya melalui para rekanan. “Mitra ini ada kontraknya tapi tidak ada pekerjaannya, hanya untuk menampung uang,” ucap Ali.

Pada awal 2008, Irzal Rinaldi Zailani, yang saat itu menjabat Kepala Divisi Pemasaran PT Dirgantara, menghubungi Didi Laksamana. Kepada Didi, Irzal menawarkan kerja sama dengan syarat perusahaan yang disiapkan Didi harus mengembalikan 90 persen pembayaran seperti yang tertuang dalam kontrak kepada PT Dirgantara. Sisanya, 10 persen, menjadi milik “mitra”.

Setelah mitra fiktif terbentuk, PT Dirgantara gencar mendekati kementerian dan lembaga. Dalam dokumen hasil pemeriksaan yang dimiliki *Tempo* disebutkan, PT Dirgantara menyampaikan kepada lembaga pemilik anggaran bahwa perusahaan akan memberikan imbalan kepada pemberi kerja dengan jumlah maksimal “*single digit*”—kurang dari 10 persen nilai proyek.

Selama 2008-2016, PT Dirgantara di bawah Budi Santoso menjalin perjanjian fiktif enam perusahaan untuk memasarkan produk dan jasa PT Dirgantara kepada Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional atau Basarnas, Kementerian Pertahanan, Pusat Penerbangan Angkatan Darat, Pusat Penerbangan Angkatan Laut, serta tujuh lembaga lain. Berdasarkan dokumen yang diperoleh *Tempo*, total ada 79 kontrak untuk pengadaan sejumlah helikopter Bell 421EP dan Super Puma NAS-332, pesawat CN-235, hingga pemeliharaan pesawat. Nilainya mencapai Rp 3,05 triliun, US\$ 374,8 juta, dan euro 74,3 juta—atau totalnya sekitar Rp 10 triliun.

Salah satu contoh pengadaan yang menggunakan mitra fiktif adalah proyek enam helikopter angkut Bell 421EP di Kementerian Pertahanan untuk TNI Angkatan Darat. Kontrak diteken pada 6 Maret



Kantor PT Bumiloka Tegar Perkasa dan PT Angkasa Mitra Karya di Kebayoran Centre, Jakarta Selatan, 22 Oktober 2020.

Direktur Utama PT Abadi Sentosa Perkasa Didi Laksamana (bawah).



2012 dengan sumber dana dari fasilitas kredit ekspor. Proyek senilai US\$ 30,324 juta itu menggandeng PT Bumiloka Tegar Perkasa. Perusahaan yang dikendalikan Didi Laksamana ini memperoleh komisi 5 persen dari nilai transaksi atau sekitar US\$ 1,67 juta. Padahal PT Bumiloka sama sekali tak punya andil dalam penjualan. Pembayaran proyek ini dilakukan bertahap pada 2012-2014.

Duit yang disebut “biaya pemasaran” itulah yang kemudian menjadi upeti untuk para jenderal. Fulus diserahkan oleh perusahaan mitra atau pejabat PT Dirgantara secara tunai. Pejabat Kementerian Pertahanan dan ketiga matra berulang kali menerima setoran karena kerap menunjuk PT Dirgantara sebagai pelaksana proyek. Untuk CN-235, PT Dir-

gantara menjual sendiri pesawat buatan-nya. Tapi, untuk helikopter Bell dan Super Puma, Dirgantara memesan dari negara asalnya, lalu merakitnya di Indonesia sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI sebagai “end user”.

Koordinator Staf Ahli Panglima TNI Mayor Jenderal Sisriadi mengatakan anggaran pengadaan alat utama sistem senjata untuk TNI ada di tangan Kementerian Pertahanan. Di Angkatan Darat, kebutuhan persenjataan biasanya dirumuskan oleh Dewan Penentu Pengadaan, yang diketuai oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Setelah beres di lingkup internal, TNI Angkatan Darat mengajukan rencana kebutuhan tersebut ke Kementerian Pertahanan. Proses selanjutnya bergulir di Kementerian.

Sisriadi, yang pernah menjadi perwira yang mengurus logistik Angkatan Darat, mengatakan ia kerap diminta Kementerian Pertahanan masuk tim pengadaan. Dalam catatan pengadaan Bell 412EP tahun anggaran 2011, Sisriadi yang waktu itu berpangkat letnan kolonel ditulis mendapatkan jatah Rp 75 juta. Sisriadi membantah mengambil setoran tersebut. “Saya tidak pernah menerimanya,” kata mantan Kepala Pusat Penerangan TNI ini.

Menurut Sisriadi, dalam sejumlah pengadaan tersebut, TNI Angkatan Darat hanya mengkomunikasikan helikopter yang dipesan dan memaparkan spesifikasi teknis yang diincar kepada PT Dirgantara. Setelah itu, bakal ada tim evaluasi pengadaan, yang biasanya diisi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, dan bawahannya. “Mereka yang menguji proses pelaksanaannya, proses penyediaan barangnya,” ucap Sisriadi.

Eris Herryanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan pada 2010-2013, mengatakan ia hanya berperan mengumpulkan data dari ketiga matra untuk dilaporkan kepada Menteri Pertahanan selaku pengambil kebijakan. “Saya khawatir sudah banyak lupa dan akurasi daya ingat saya kurang bagus,” kata Eris.



KONGSI dengan mitra fiktif dilakukan

PT Dirgantara Indonesia dalam pengadaan di semua matra. Dalam pengadaan tiga unit pesawat CN-235-200 Patmar untuk TNI Angkatan Laut dengan anggaran dari Kementerian Pertahanan senilai US\$ 3,99 juta pada 2009 yang pembayarannya berlanjut ke tahun berikutnya, PT Dirgantara juga menggandeng PT Bumiloka Tegar Perkasa. Kali ini Bumiloka memperoleh fee 7 persen dari total “biaya pemasaran”.

Sebagian “biaya” ini kemudian mengalir kepada sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan. Nama Eris Herryanto kembali tertera. Di dalam catatan aliran uang, angka di sebelah namanya tertulis Rp 200 juta. Selain mengalir kepada pejabat Kementerian Pertahanan, uang ditengarai mengucur kepada petinggi TNI Angkatan Laut saat itu. Salah seorang laksamana mendapat jatah lebih dari Rp 1 miliar. Laksamana lain kebagian Rp 250-500 juta.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Kolonel Yulius Widjojono menyatakan tidak mengetahui ihwal pembelian pesawat yang berlumur korupsi ataupun adanya bagi-bagi uang. “Saya tidak paham, dan itu sudah beberapa tahun yang lalu. Tidak mungkin saya dalam. Silakan ke Kemenhan,” ujar Yulius.

Adapun Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal I.E. Djoko Purwanto tak menjawab langsung pertanyaan *Tempo*. Ia

“Saya khawatir sudah banyak lupa dan akurasi daya ingat saya kurang bagus.”

— ERIS HERRYANTO,
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERTAHANAN
PADA 2010-2013

mengutus anggota stafnya, Letnan Kolonel Susanto, untuk merespons pertanyaan. “Biro Humas tidak memberikan komentar karena masalah tersebut sudah masuk ranah hukum,” kata Susanto.

PT Dirgantara Indonesia tak hanya menyediakan pesawat atau helikopter. Terkadang mereka juga menyediakan jasa pemeliharaan. Perusahaan yang digandeng lain lagi, tapi tetap di bawah naungan Didi Laksamana. Contohnya pemeliharaan lanjutan helikopter Super Puma NAS-332 LI pada 2016. Untuk mencatat sebagian anggaran proyek, PT Dirgantara memakai PT Abadi Sentosa Perkasa. Nilai kontrak jasa pemeliharaan tersebut mencapai Rp 29,05 miliar. PT Abadi pun mendapatkan bagian dari “biaya pemasaran”.

Budi Santoso, bekas Direktur PT Dirgantara Indonesia, lewat pengacaranya mengatakan mitra atau agen penjualan itu sudah menjalin hubungan dengan PT Dirgantara sebelum ia memimpin perusahaan tersebut pada 2007. “Pak Budi hanya meneruskan. Sebelumnya, fee untuk mitra sampai dua digit,” tutur Muhammad Arief Sulaiman, pengacara Budi. Arief mengatakan tak mengetahui bahwa fee itu dialirkan lagi sebagai setoran kepada sejumlah pejabat di lembaga pemilik anggaran. Ia mengatakan orang yang mengurus hal tersebut adalah Irzal Rinaldi, bekas Kepala Divisi Pemasaran, dan Didi Laksamana dari rekanan.

Pengacara Irzal, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, menyatakan kliennya sebagai kepala divisi hanya menjalankan perintah direksi. Dia berdalih Irzal tidak paham jika ada jatah atau permintaan dana khusus untuk pemberi kerja. “Klien kami tidak tahu,” ujarnya.

Adapun Didi Laksamana enggan memberikan tanggapan. *Tempo* menyambangi Didi di kediamannya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Yang terlihat di rumah itu hanya seorang asisten rumah tangganya. “Nanti surat konfirmasinya saya sampaikan kepada Bapak,” ucap perempuan yang mengaku bernama Atun itu. Kuasa hukum Didi, Yanuar Wasesa, mengatakan kliennya sudah menerima surat konfirmasi dari *Tempo*. “Pak Didi tidak mau diwawancarai,” kata Yanuar.

✎ LINDA TRIANITA, RIKY FERDIANTO, MUSTAFA SILALAH, ANTON SEPTIAN



LAPORAN UTAMA



KERUGIAN NEGARA

Rp **202.196.497.761,42** miliar dan US\$ **8.659.945,27**

4. Pemberi kerja

Total: **Rp 178,9 miliar**

Duit untuk pemberi kerja yang disebut "cash back" itu diduga mengalir ke puluhan perwira tinggi dan menengah dari tiga matra. Dalam catatan pemberian uang, mereka yang namanya tertulis di antaranya:

1. Proyek pesawat CN-235-220 Patmar TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2009

- » Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya Eris Herryanto: **Rp 200 juta**
- » Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya G: **Rp 200 juta**
- » Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsekal Muda MS: **Rp 400 juta**
- » Sekretaris Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Brigadir Jenderal DS: **Rp 100 juta**
- ▼ Laksamana TEP: **US\$ 163.043**
- ▼ Marsekal Muda BP: **Rp 200 juta**
- ▼ Laksamana Muda S: **Rp 500 juta**

PENERIMA:

1. Pejabat atau pegawai

PT Dirgantara, di antaranya:

- » Budi Santoso **Rp 2,009 miliar**
- » Irzal Rinaldi Zailani **Rp 13,09 miliar**
- » Budiman Saleh **Rp 686,15 juta**
- » Arie Wibowo **Rp 1,03 miliar**
- » Lainnya: **Rp 3,5 miliar**

2. Pihak luar PT Dirgantara:

Total nilai: **Rp 8,1 miliar**

3. Mitra pengadaan/penjualan alias rekanan

Total: **Rp 82,43 miliar**

'CASH BACK' DARI LANGIT

SEPANJANG 2008-2016, PT Dirgantara Indonesia mengalirkan duit kepada sejumlah jenderal dan perwira menengah di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia lewat perusahaan rekanan. Fulus dalam bentuk rupiah dan dolar itu juga diberikan kepada pejabat di Kementerian Sekretariat Negara hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Total upeti mencapai Rp 178,98 miliar. Duit itu merupakan imbalan atas 79 kontrak dari pemberi kerja, lembaga pemilik anggaran yang disebut sebagai "end user", yang sebagian di antaranya untuk pengadaan pesawat dan helikopter. Total kontrak dari pemberi kerja mencapai Rp 3,052 triliun, US\$ 374,85 juta, dan 74,31 juta euro—atau totalnya sekitar Rp 10 triliun.

KONTRAK

Total kontrak:

79

Nilai proyek:

Rp **3,052**
triliun

US\$

374,85
juta

74,31
juta euro

Lembaga	Jumlah Kontrak	Nilai Kontrak
1. Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)	2	Rp 267,2 miliar
2. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1	Rp 2,78 miliar
3. Kementerian Pertahanan	4	Rp 66,35 miliar
4. Kementerian Pertahanan-Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan	2	Rp 28,98 miliar
5. Kementerian Pertahanan-TNI Angkatan Darat	3	US\$ 234,97 juta dan 74,31 juta euro
6. Kementerian Pertahanan-TNI Angkatan Laut	4	Rp 330 miliar dan US\$ 139,87 juta
7. Kementerian Pertahanan - TNI Angkatan Udara	22	Rp 1,291 triliun
8. Kepolisian Udara	3	Rp 134,29 miliar
9. Pusat Penerbangan Angkatan Darat	24	Rp 655,61 miliar
10. Pusat Penerbangan Angkatan Laut	5	Rp 16,93 miliar
11. Sekretariat Negara	9	Rp 258,82 miliar

NASKAH: LINDA TRIANITA | SUMBER: KONFERENSI PERS KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI, DOKUMEN TIM PENASIHAT HUKUM | FOTO: TEMPO/IMAM SUKAMTO (BUDI, IRZAL, BUDIMAN, ARIE)



- ▼ Laksamana Muda AS: **Rp 250 juta**
- ▼ Kolonel SS: **Rp 1,8 miliar**

2. Proyek helikopter Bell 412EP Kementerian Pertahanan-TNI Angkatan Darat APBN-P 2011

- » Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya Eris Herryanto: **Rp 250 juta**
- » Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya G: **Rp 200 juta**
- » Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsekal Madya S: **Rp 125 juta**

- » Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Budiman: **US\$ 100 ribu**
- » Mayor Jenderal SW: **Rp 200 juta**

3. Proyek helikopter Bell 412EP (hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur) tahun anggaran 2012

- » Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya Eris Herryanto: **Rp 100 juta**
- » Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya G: **Rp 100 juta**

MENGALIR HINGGA SENAYAN

- » Bukti transfer uang dari PT Angkasa Mitra Karya ke rekening Francyanto Widjaja sejumlah Rp 1,5 miliar dengan keterangan "Apresiasi Senayan", Maret 2011.
- » Pengiriman uang ke rekening JP Morgan International Bank Limited Brussels atas nama Forestry Green Investment Ltd, perusahaan cangkang di British Virgin Islands, sejumlah US\$ 149,6 juta, Juli 2014, dengan keterangan "Apresiasi Senayan untuk Proyek PT DI CN-235 Patmar Serie II No: 16.579".

BODONG

Dalam menggelontorkan setoran, PT Dirgantara Indonesia menggunakan cara memutar. Duit dialirkan lebih dulu ke enam perusahaan rekanan yang disebut sebagai mitra pengadaan atau mitra penjualan. Perusahaan mendapatkan *fee* hingga 10 persen dari nilai kontrak induk, yang dikemas dalam kontrak pekerjaan tertentu, dari jasa pengadaan dan penjualan hingga jasa pemeliharaan dan pengadaan roket. Tapi pekerjaannya diduga fiktif.

Perusahaan

Nilai Kontrak Total

PT Bumiloka Tegar Perkasa

Rp 55,71 miliar dan US\$ 3,68 juta

Contoh kontrak: Jasa mitra penjualan tiga unit pesawat CN-235-200 Patmar ke Kementerian Pertahanan/TNI Angkatan Laut, 2008

PT Angkasa Mitra Karya

Rp 97 miliar dan US\$ 4,96 juta

Contoh kontrak:

- » Pengadaan satu unit helikopter Bell 412EP untuk Kementerian Pertahanan/TNI Angkatan Darat/Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2012
- » Pengadaan empat unit helikopter serbu Bell 412EP untuk TNI Angkatan Darat, 2011
- » Pengadaan dua unit helikopter Super Puma NAS-332 untuk Kementerian Pertahanan/TNI Angkatan Udara, 2011

PT Penta Mitra Abadi

Rp 2,96 miliar

Contoh kontrak: Pengadaan tujuh unit *weather radarr* rakitan PT Dirgantara Indonesia untuk TNI Angkatan Darat/Pusat Penerbangan Angkatan Darat, 2015

PT Niaga Putra Bangsa

Rp 835 juta

Contoh kontrak: Jasa pengadaan dan pemasangan sistem pemadam kebakaran mesin untuk Pusat Penerbangan Angkatan Darat, 2014

PT Abadi Sentosa Perkasa

Rp 29,05 miliar

Contoh kontrak: Jasa pemeliharaan lanjutan helikopter Super Puma NAS-332 LI, 2016

PT Selaras Bangun Usaha

Rp 20,05 miliar

Contoh kontrak: Pengadaan *rocket motor* MK4/40, *head smoke* FZ-32, dan *inert practice*, 2012

- » Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda RL: **Rp 50 juta**
- » Brigadir Jenderal SA: **Rp 50 juta**
- » Laksamana Muda RL: **Rp 50 juta**
- » Mayor Jenderal EP: **Rp 75 juta**

4. Aliran uang lain ke pejabat Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan

- » Marsekal Madya M. Syaugi: **Rp 200 juta**
- » Laksamana Muda EM: **Rp 100 juta**
- » Marsekal Muda BP: **Rp 100 juta**
- » Brigadir Jenderal A: **Rp 100 juta**
- » Letnan Kolonel CP: **Rp 30 juta**

5. Aliran ke Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan (periode selanjutnya)

- » Laksamana Muda S: **Rp 200 juta**
- » Laksamana Pertama DAG: **Rp 150 juta**
- » Marsekal Pertama MEL: **Rp 100 juta**
- » Brigadir Jenderal MS: **Rp 100 juta**
- » Brigadir Jenderal MB: **Rp 100 juta**

6. Aliran uang ke Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan

- » Laksamana Muda L: **Rp 200 juta**
- » Laksamana Muda S: **Rp 100 juta**
- » Marsekal Muda DDI: **Rp 150 juta**
- » Marsekal Muda AS: **Rp 100 juta**
- » Brigadir Jenderal AS: **Rp 100 juta**

7. Aliran ke Markas Besar TNI Angkatan Udara

- » Marsekal Muda MN: **Rp 200 juta**
- » Marsekal Pertama NPS: **Rp 100 juta**
- » Marsekal Pertama RSM: **Rp 100 juta**
- » Marsekal Pertama MS: **Rp 100 juta**
- » Marsekal Muda SB: **Rp 200 juta**
- » Marsekal Muda AM: **Rp 100 juta**
- » Marsekal Muda B: **Rp 200 juta**
- » Marsekal Pertama YS: **Rp 100 juta**

8. Aliran ke Markas Besar TNI Angkatan Darat

- » Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Moeldoko: **Rp 1 miliar**
- » Letnan Jenderal MM: **Rp 300 juta**
- » Mayor Jenderal RP: **Rp 200 juta**
- » Mayor Jenderal M: **Rp 200 juta**
- » Brigadir Jenderal S: **Rp 100 juta**

MEMUTAR LEWAT KARIBIA

PT Dirgantara Indonesia dan perusahaan mitra memanfaatkan peran rekening perusahaan cangkang di luar negeri untuk menyalurkan suap. Rekening yang sama digunakan dalam kasus suap Badan Keamanan Laut.

SELEMBAR kuitansi dari PT Bumiloka Tegar Perkasa membuat dokter gigi Francyanto Widjaja masuk radar Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada 2014, PT Bumiloka mengirimkan uang kepada Francyanto senilai Rp 1,5 miliar. Kolom keterangan kuitansi menyebutkan uang itu sebagai “Apresiasi Senayan”.

Dihubungi lewat telepon, Francyanto mengakui pernah menerima pengiriman uang dari PT Bumiloka. Selain membuka praktik dokter gigi, pria berusia sekitar 70 tahun ini memiliki perusahaan penukaran uang. “Tapi itu bukan uang untuk saya,” katanya, Sabtu, 24 Oktober lalu. “Saya juga tak paham maksud keterangan ‘Apresiasi Senayan’ dalam kuitansi.” Francyanto mengetahui ia diincar KPK karena menerima surat panggilan pemeriksaan.

PT Bumiloka digandeng PT Dirgantara Indonesia sebagai “mitra” pemasaran. Tapi perusahaan ini sebenarnya tak berperan apa-apa. Bumiloka, bersama lima perusahaan lain yang dikendalikan Didi Laksamana, diduga dipakai sebagai kedok untuk menyamarkan setoran PT Dirgantara kepada sejumlah perwira di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, pejabat di kementerian, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat. “Apresiasi Senayan” maksudnya setoran untuk anggota DPR.

Jejak aliran duit ke DPR juga terekam dalam kuitansi lain. Didi Laksamana mengirimkan pembayaran kepada Kepala Divisi Pemasaran PT Dirgantara Indonesia Irzal Rinaldi Zailani pada 17 September 2004. Didi membubuhkan tulisan pada kolom keterangan: “Apresiasi Senayan proyek PTDI CN-235 Patmar Serie II”. Nomor proyek pengadaan pesawat tersebut ditulis “16.579”. Uang yang ditransfer berjumlah US\$ 149.600 atau Rp 2,2 miliar

dalam kurs saat ini.

Sementara pada kuitansi pertama “Apresiasi Senayan” dialirkan lewat Francyanto, pada kuitansi kedua dana memutar dulu hingga ke Karibia. Pada alamat pengiriman tertulis nomor 98903xx di bank JP Morgan, Brussels, Belgia. Pemiliknya: perusahaan cangkang bernama Forestry Green Investment Ltd yang berbasis di negara suaka pajak, British Virgin Islands.

Francyanto dan Forestry Green Investment Ltd pernah muncul dalam dua perkara korupsi. KPK memanggil Francyanto sebagai saksi korupsi suap pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia pada 7 Maret 2017. Pemeriksaan itu berbarengan dengan seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi tersangka. Francyanto mengakui adanya pemeriksaan tersebut, tapi enggan menjelaskan detail pemeriksaan.

Adapun Forestry Green mencuat dalam korupsi pengadaan *drone* dan satelit di Badan Keamanan Laut yang menyeret anggota Komisi Pertahanan DPR, Fayakhun Andriadi. Di persidangan terungkap politikus Partai Golkar itu menerima pengiriman uang dari bank JP Morgan atas nama Forestry Green Investment Ltd.

Pengacara Fayakhun, Ahmad Hadi Fir-

“Saya jadi KSAD hanya tiga bulan, tidak sempat mengurus pengadaan. Dan pastinya saya juga sudah tidak ingat.”

— MOELDOKO, KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT (20 MEI-20 AGUSTUS 2013), KEPALA STAF KEPRESIDENAN



man, membenarkan adanya penggunaan rekening luar negeri. Tapi ia mengaku tak mengetahui identitas pemilik rekening. Ia juga tak mengetahui kaitan rekening tersebut dalam tebaran setoran dari PT Dirgantara kepada anggota DPR. “Klien kami juga tidak pernah terlibat suap PT DI,” ujarnya.

Seorang penegak hukum mengatakan praktik menggunakan nama dan rekening berlapis lazim digunakan untuk menghilangkan jejak suap. Nama dan rekening Francyanto dan Forestry Green diduga digunakan untuk menyamarkan aliran duit.

Menurut penelusuran *Tempo*, perusahaan itu telah ditutup oleh otoritas setempat karena tak membayar biaya tahunan. Penutupan Forestry bersama puluhan pe-

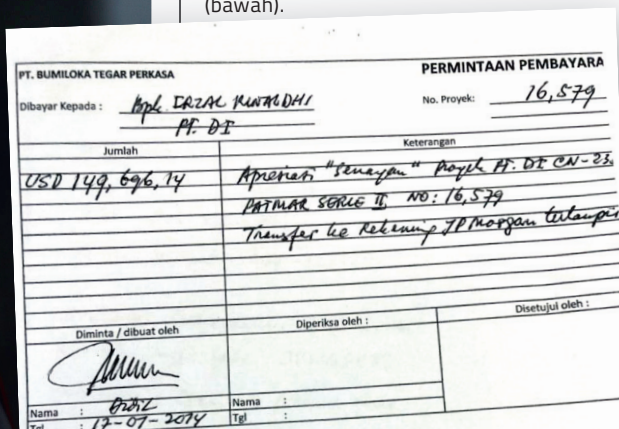
“Jangan memancing saya mengomentari berita yang saya sendiri tidak akui. Sebagai Sekretaris Jenderal, bukan pejabat yang menentukan, kenapa harus terima uang?”

—ERIS HERRYANTO, SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN 2010-2013

TEMPO/IMAM SUKANTO (IRZAL), ISTIMEWA (KUITANSI)

Tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran pesawat PT Dirgantara Indonesia, Irzal Rinaldi, menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 1 September 2020.

Kuitansi yang diduga sebagai bukti penyerahan uang kepada Komisi I DPR (bawah).



rusahaan lain itu diberitakan dalam *Virgin Islands Official Gazette*, surat kabar resmi pemerintah di sana, pada 14 April 2016.



PT Dirgantara Indonesia bermitra dengan PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Angkasa Mitra Karya, PT Penta Mitra Abadi, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Abadi Sentosa Perkasa sejak 2008. Adapun PT Selaras Bangun Usaha digandeng pada 2012. Mereka turut terlibat dalam berbagai proyek pengadaan pesawat dan helikopter di instansi pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan.

Para rekanan fiktif itu kemudian mendapatkan komisi berupa “biaya pemasaran”

dari kontraknya dengan PT Dirgantara. PT Bumiloka, misalnya, mendapatkan “kontrak” Rp 55,7 miliar dan US\$ 3,68 juta. Dari nilai itu, perusahaan rekanan berhak mendapatkan 10 persennya. Sisanya harus dikembalikan lagi kepada PT Dirgantara. Duit inilah yang dialokasikan untuk upeti kepada para pejabat.

Dokumen yang diperoleh *Tempo* menyebutkan PT Dirgantara juga memberikan imbalan kepada pejabat di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas), serta Sekretariat Negara. Jumlah imbalan tergantung nilai proyek. KPK menyebutkan uang komisi proyek sebesar 5-10 persen dari nilai proyek.

Basarnas pernah menjalin dua kontrak dengan PT Dirgantara. Nilainya mencapai Rp 267 miliar. Bekas Kepala Basarnas, Marsekal Madya (Purnawirawan) Muhammad Syaugi, membantah jika lembaganya disebut pernah menerima imbalan dari proyek bersama PT Dirgantara. “Saya tidak pernah menerima suap,” kata Syaugi, yang juga mantan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Kepala BPPT Hammam Riza juga tak mengetahui ihwal besel dari PT Dirgantara Indonesia. Ia tak paham soal kontrak senilai Rp 2,7 miliar dengan PT Dirgantara. “Saya baru menjabat tahun 2019,” ucapnya. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Surya Utama tak merespons pertanyaan hingga Sabtu, 24 Oktober lalu.

Sebagaimana tertera dalam dua kuitansi “Apresiasi Senayan”, Didi Laksamana disebut mengetahui aliran uang kepada para pejabat pemberi proyek ke PT Dirgantara. Tapi, kata orang dekat Didi, Didi hanya menjalankan perintah Irzal Rinaldi Zailani, yang belakangan dipromosikan menjadi asisten direktur utama. Irzal diduga sebagai pemberi perintah pengiriman uang. Pengacara Irzal, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, membantah tuduhan ini. “Dia tidak terlibat suap,” katanya.

Juru bicara KPK bidang penindakan, Ali Fikri, belum mau berkomentar soal aliran uang PT Dirgantara kepada pejabat di banyak lembaga. KPK masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengembangkan perkara. “Semua akan kami ungkap di persidangan. Kita tunggu dan ikuti saja prosesnya. Saya tidak bisa menyampaikan sekarang,” tuturnya.

RIKY FERDIANTO, LINDA TRIANITA

TNIAD.MIL.ID (BUDIMAN)

“Perlu saya tegaskan, yang dikatakan adanya *entertainment* dan sebagainya, saya dan kawan-kawan ini tidak menerima sama sekali karena memang kami tidak mau.”

—BUDIMAN, WAKIL KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT 2011-2013, KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT 2013-2014



“Pengadaan itu adanya di Baranahan (Badan Sarana Pertahanan). Waduh, apalagi dibidang terima uang. Enggak ada, lah.”

—M. SYAUGI, DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN 2014-2017, KEPALA BASARNAS 2017-2019

AGEN FIKTIF NEGERI GINSENG

Penjualan pesawat CN-235 dari PT Dirgantara Indonesia ke Korea Selatan diusut penegak hukum di sana. Diduga menggunakan perusahaan cangkang sebagai agen penjual.

SUAP PT Dirgantara Indonesia diduga mengalir hingga ke Korea Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi sebenarnya sudah menerima laporan besel penjualan pesawat produksi PT Dirgantara ke Negeri Ginseng tiga tahun lalu.

Namun penyidikan masih berfokus di dalam negeri. “Sementara kasus yang kami tangani yang di dalam negeri. Kalau nanti ada perkembangan ke sana (kontrak penjualan luar negeri), bisa saja,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, Selasa, 13 Oktober lalu.

Korea Coast Guard berencana membeli empat pesawat CN-235 seri 110 pada 2010. Lewat proses negosiasi, pemerintah Korea dan PT Dirgantara menyepakati harganya US\$ 25 juta per unit. Pesawat tersebut kemudian diserahkan PT Dirgantara kepada Korea Coast Guard pada 2012.

Di depan mata, di sini seolah-olah tak terjadi apa-apa. Tapi di balik negosiasi dan pembayaran pesawat tercium aroma tak sedap. Seorang anggota Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara, yang melaporkan kasus suap ini ke KPK tiga tahun lalu, mengatakan modus penjualan produk PT Dirgantara di dalam ataupun luar negeri tak jauh berbeda. “Sama-sama menggunakan mitra fiktif,” ujar pegawai yang enggan disebutkan namanya itu, pertengahan Oktober lalu.

Dalam penjualan pesawat CN-235 seri 110 ke Korea Selatan, PT Dirgantara menunjuk Lee Kang & Partners sebagai agen di sana. Indikasi korupsi muncul karena nilai komisi Lee Kang & Partners berubah-ubah. Kontrak kerap diamendemen meskipun Lee Kang & Partners nyaris tak berperan dalam jual-beli pesawat.

Korean Air Force bahkan memasukkan

Lee Kang & Partners ke daftar perusahaan hitam. Di Indonesia, Lee Kang & Partners justru bermitra dengan PT Bumiloka Tegar Perkasa, perusahaan yang sedang diusut KPK. Namun PT Dirgantara tetap menggandeng Lee Kang & Partners meski memiliki rekam jejak yang buruk di negara asalnya.

Si pegawai yang enggan disebutkan namanya mengatakan Direktur Utama PT Dirgantara 2007-2017, Budi Santoso, bersahabat dengan pemilik Lee Kang & Partners. Mereka berkenalan sejak Budi menjabat Direktur Utama PT Pindad. Budi berkarier di PT Pindad sejak 1998 hingga 2007. Dia satu dari enam tersangka korupsi PT Dirgantara yang tengah ditelisik KPK sejak awal tahun lalu.

Dari penelusuran mitra kolaborasi *Tempo* di Korea, *KCIJ Newstapa*, Lee Kang & Partners menjadi agen PT Dirgantara sejak 2008. Pemimpin Lee Kang & Partners, Lee Deok-gyu, baru mendirikan perusahaan yang menjadi agen dalam bisnis jual-beli senjata militer ini ketika Korea Coast Guard memutuskan untuk membeli empat CN-235 seri 110 dari Indonesia pada 2010.

Saat itu, Lee masih bekerja di salah satu perusahaan perdagangan terbesar di Korea, Daewoo International. Menurut seorang petugas di Korea Coast Guard yang telah mengamati kesepakatan tersebut sejak sepuluh tahun lalu, PT Dirgantara menunjuk perusahaan Lee sebagai agen buat penjualan CN-235 untuk Korea Selatan. Padahal Lee tak berpengalaman dalam perdagangan pesawat.

Di tangan Lee, harga keempat pesawat itu menjadi US\$ 112 juta, naik dari US\$ 100 juta yang disepakati di awal. Alarm menyala di kantor penegak hukum Korea. Mereka mengendus kejanggalan dalam negosiasi tersebut. Pemilik dan pegawai



Penandatanganan perjanjian kerja sama Kementerian Pertahanan RI dan Korea Selatan terkait dengan pembelian jet latih T-50 buatan Korea Selatan dan CN-235 buatan PT Dirgantara Indonesia.

Lee Kang & Partners diduga menampung uang komisi dari PT Dirgantara sebesar 6 miliar won atau setara dengan Rp 77,9 miliar di perusahaan cangkang Contour Pacific Limited di British Virgin Islands.

Di pengadilan, jaksa Korea Selatan mendakwa Lee Kang & Partners dengan pasal pencucian uang. Operasi ini didu-



ga dilakukan di dalam dan luar negeri. Lee Deok-gyu dan seorang manajer di Lee Kang & Partners menghadapi dakwaan. Tapi mereka tak ditahan.

Nama Contour Pacific tercantum dalam dokumen Panama Papers—bocoran data klien firma hukum Mossack Fonseca dari berbagai negara yang membuka perusahaan di negara suaka pajak—yang terbongkar pada 2016. Dokumen Panama Papers mencantumkan Lee mendirikan Contour Pacific pada Juli 2005. Lee menjadi satu-satunya direktur dan pemegang saham.

Kepada *KCIJ Newstapa*, Lee mengatakan

pembentukan perusahaan cangkang dapat diputuskan hanya oleh manajer umum setingkat direktur. “Karena sifat dari perusahaan perdagangan umum,” ujarnya. Setelah menuntaskan kasus yang menyandungnya di Korea, Lee berencana menggugat PT Dirgantara di Seoul. Ia belum menyebutkan alasan gugatan.

Muhammad Arief Sulaiman, kuasa hukum mantan Direktur Utama PT Dirgantara, Budi Santoso, mengaku tak mengetahui proyek penjualan produk PT Dirgantara di Korea. “Pak Budi tidak cerita ke kami soal ini,” katanya.

Hingga pertengahan Oktober lalu, KPK

sudah menetapkan enam tersangka dalam kasus penjualan produk PT Dirgantara di dalam negeri. Selain Budi Santoso, mereka adalah Kepala Divisi Pemasaran yang belakangan menjadi Asisten Direktur Utama, Irzal Rinaldi Zailani; Direktur Niaga dan Restrukturisasi Budiman Saleh; serta Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PT Dirgantara Indonesia 2007-2012, Arie Wibowo.

Meski bertabur masalah hukum, kerja sama PT Dirgantara dengan pemerintah Korea tetap berjalan setelah transaksi pesawat CN-235. Keduanya tengah mengembangkan proyek pesawat tempur generasi 4.5 Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) sejak 2011.

Produksi massal pesawat ini ditargetkan pada 2026. Dalam proyek massal tersebut, PT Angkasa Mitra Karya diduga berupaya menjadi mitra proyek prestisius ini. Bersama PT Bumiloka, PT Angkasa juga tengah berperkar di KPK.

Dalam catatan yang diperoleh *Tempo*, PT Angkasa diduga menyeter Rp 18,4 miliar dan US\$ 60 ribu demi memuluskan proyek pesawat tempur itu. Uang tersebut berasal dari pemilik PT Angkasa, Didi Laksamana. Ada juga uang yang ditujukan kepada Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Irzal Rinaldi Zailani.

Duit itu diserahkan dalam sembilan tahap. Menurut penegak hukum yang mengetahui kasus ini, seluruh duit diambil dari *fee* pelaksanaan pengadaan suku cadang pesawat yang diperoleh PT Angkasa dari PT Dirgantara.

Kuasa hukum Didi, Yanuar Wasesa, mengatakan kliennya tak mau berkomentar soal penjualan CN-235 ke Korea. “Pak Didi juga melarang saya berkomentar,” ucap Yanuar. Pengacara Irzal, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, mengatakan uang dari proyek ini belum tentu masuk ke kliennya. “Bisa saja Pak Didi ini juga nakal. Mengklaim diberikan kepada Irzal tapi ternyata diambil sendiri,” ujar Tjoetjoe.

Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan penelusuran suap PT Dirgantara masih panjang. Ia mengatakan penyidik membuka peluang penetapan tersangka baru dan pengembangan kasus. “Kita tunggu proses selanjutnya,” katanya.

① LINDA TRIANITA, CHOI WONSUK (*KCIJ NEWSTAPA*)

Liputan ini bagian dari proyek Money Trial yang terselenggara berkat kolaborasi *Tempo* dan media Korea Selatan, *KCJ Newstapa*, serta didukung oleh Journalismfund.eu.

MANTAN KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT, JENDERAL (PURNAWIRAWAN) MOELDOKO: **SAYA TIDAK PAHAM LOGISTIK**

NAMA Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purnawirawan) Moeldoko tertera dalam catatan penerima uang dari PT Dirgantara Indonesia yang dialirkan perusahaan rekanan. Catatan itu menyebutkan Moeldoko menerima Rp 1 miliar saat menjabat Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Kepada *Tempo*, dalam wawancara lewat konferensi video pada Jumat, 23 Oktober lalu, Moeldoko menyanggah isi catatan tersebut.



Catatan perusahaan mitra PT Dirgantara menuliskan Anda menerima Rp 1 miliar saat menjabat KSAD. Tanggapan Anda?

Saya pikir enggak benar. Tahun pengadaannya itu pada 2011 (pengadaan empat helikopter Bell 412EP untuk TNI Angkatan Darat—red.). Saat itu, saya masih menjadi Panglima Kodam Siliwangi atau Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional. Dengan waktu yang hanya tiga bulan itu, saya merasakan sebagai kepala staf lebih (mengurusi) ke pembinaan. Dari awal sebagai komandan dan panglima lebih ke pembinaan. Urusan logistik, saya tidak paham.

(Menurut sumber *Tempo*, meski tahun pengadaannya telah lewat, pelunasannya bisa sampai beberapa tahap hingga tahun-tahun berikutnya.)

Bagaimana proses pengadaan pesawat atau helikopter di lingkup internal TNI Angkatan Darat?

Saya menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat hanya tiga bulan, Mei 2013 hingga Agustus 2013. Saya tidak sempat mengurus pengadaan. Waktu saya sangat singkat, ya. Proses pengadaan itu panjang dan bertahun-tahun. Saya tidak masuk ke situ. Saya waktu itu lebih *concern* ke bidang latihan, pembinaan satuan.

Apakah benar ada pemberian komisi dari perusahaan mitra PT Dirgantara Indonesia dalam setiap proyek pengadaan kepada TNI Angkatan Darat?

Dan pastinya saya juga sudah tidak ingat. ❗

PENGACARA IRZAL RINALDI ZAILANI,
TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO:

JUALAN PESAWAT TIDAK MUDAH

KOMISI Pemberantasan Korupsi menduga Irzal Rinaldi Zailani berperan sentral dalam suap PT Dirgantara Indonesia kepada pejabat di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Ia menekan 20 kontrak proyek pengadaan pesawat dan helikopter saat menjabat Kepala Divisi Pemasaran PT Dirgantara. Pengacara Irzal, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, menjelaskan duduk perkara besel itu kepada wartawan *Tempo*, Linda Trianita dan Riky Ferdianto, di kantornya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, pada Selasa, 20 Oktober lalu.



perusahaan mitra. Cara ini berhasil menyelamatkan PT DI. Ini praktik yang lazim dalam bisnis kedirgantaraan.

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai pelibatan mitra mengandungi unsur korupsi. Tanggapan Anda?

Kerugian yang dipersoalkan KPK itu adalah imbalan bagi perusahaan mitra. Mereka berhak mendapatkan bagian itu karena diatur dalam kontrak perjanjian kerja sama. Karena mereka yang bekerja mencari pembeli produk PT DI. Kalau ada aliran uang kepada pejabat kementerian atau lembaga, itu kan bukan uang PT DI, tapi uang perusahaan mitra.

Bagaimana soal tuduhan kerugian negara hingga Rp 300 miliar akibat tindakan Irzal?

Besar sekali tanggung jawab klien saya? Irzal itu hanya pelaksana teknis, jabatannya kepala divisi penjualan. Tugas tambahannya adalah asisten direksi. Dia ini pelaksana tugas, bekerja atas dasar perintah direksi dan aturan perusahaan. Tidak *fair* kalau KPK melimpahkan semua dosa kepada klien saya. Bagaimana dengan atasannya, perusahaan mitra, dan penerima suap? ❗

Klien Anda mengatur suap?

Bahwa perusahaan mitra PT Dirgantara Indonesia punya hubungan baik dengan pejabat di kementerian dan lembaga, itu wajar. Soal indikasi suap ke pejabat, itu bukan urusan klien saya.

Tapi ada kuitansi aliran dana PT Bumiloka Tegar Perkasa kepada Irzal untuk para pejabat?

Klien saya tidak tahu soal kuitansi itu. Nama klien saya dicatat. Saya juga baru dengar ada keterlibatan sejumlah perusahaan lain untuk menampung dan menyalurkan uang. Dalam pemeriksaan Irzal tak pernah ditanyakan.

Mengapa PT Dirgantara melibatkan perusahaan mitra?

Mereka dipilih bukan karena lelang. Saat itu PT DI tidak punya duit. Jual pesawat tidak mudah. Perusahaan negara ini hampir ambruk karena pailit. Maka dipilih opsi menggandeng

